

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP
BENCANA BANJIR DI DESA RAWANG OGUANG
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**NERI SAPUTRI
220411056**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 11
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. RISVANDI, S.Pd., M.Si (Anggota Penguji II) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



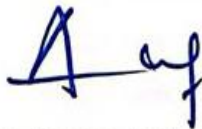
SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
TERHADAP BENCANA BANJIR DI DESA
RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN
HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : NERI SAPUTRI
NPM : 220411056
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PEMBIMBING II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

ABSTRAK

ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**NERI SAPUTRI
NPM. 220411056**

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam analisis kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir dilaksanakan di desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penerikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mana jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian reduksi data, dan penyajian data. Setelah penulis turun lapangan secara langsung dan melakukan wawancara dengan informan yang penulis pilih tersebut maka hasil yang penulis dapat tentang Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Bencana Banjir

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMMUNITY PREPAREDNESS FOR FLOOD DISASTER IN RAWANG OGUANG VILLAGE KUANTAN HILIR SEBERANG SUB-DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

**NERI SAPUTRI
NPM. 220411056**

This research was conducted in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang Sub-district, Kuantan Singingi Regency. The study aims to deeply examine the analysis of flood disaster preparedness carried out in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang Sub-district, Kuantan Singingi Regency. The problem formulated in this study is how flood disaster preparedness is in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang Sub-district, Kuantan Singingi Regency. The sample selection technique used in this study is purposive sampling, in which the determination of informants is based on specific considerations. The total number of informants in this study is there people. The data analysis used is descriptive qualitative approach, involving in-depth interviews, followed by data reduction, and data presentation. After the author went directly into the field and conducted interviews with informants chosen by author, the resulst obtained by the author regarding the Analysis of Community Preparedness for Flood Disasters in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency were quite good.

Keywords : Preparedness, Flood Disaster

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAH SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep/ Landasan Teori	8
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	8
2.1.2 Teori/Konsep Mitigasi Bencana	13
2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	17
2.1.4 Teori/Konsep Kesiapsiagaan	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis.....	28
2.3.1 Hipotesis Utama.....	28
2.3.2 Hipotesis pendukung	28
2.4 Definisi Operasional	28
2.4.1 Pengetahuan	28
2.4.2 Rencana Tanggap Darurat	29
2.4.3 Sistem Peringatan Dini	29
2.4.4 Mobilisasi Sumber Daya.....	29
2.5 Operasional Variabel.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2. Informan.....	31
3.3 Sumber Data.....	32
3.3.1 Data Primer.....	32
3.3.2 Data Sekunder.....	32
3.4 Fokus Penelitian	33
3.5 Lokasi Penelitian.....	33
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6.1 Observasi	33
3.6.2 Wawancara	33
3.6.3 Dokumentasi	34
3.6.4 Triangulasi	34
3.7 Analisis Data	34
3.7.1 Data Reducation (Reduksi Data)	35
3.7.2 Data Display (Penyajian Data)	35
3.7.3 Conlution Drawing (Penerikan Kesimpulan)	35
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	36
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mardiatno et all (2017 : 13) Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah rawan bencana alam. Berbagai kejadian bencana yang dialami oleh Indonesia salah satunya yaitu bencana banjir. Banjir di Indonesia pada umumnya disebabkan karena faktor tingginya intensitas curah hujan karena negara Indonesia memiliki iklim tropis. Bencana selalu melanda setia tahunnya di hampir semua wilayah di Indonesia.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB No. 4 Tahun 2008, banjir merupakan bencana alam yang paling dapat diperkirakan kedatangannya, karena berhubungan dengan besar curah hujan. Banjir sebagai fenomena alam yang berkaitan dengan ulah manusia terjadi sebagai akumulasi beberapa faktor yaitu hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meninngkat, perencanaan pembagunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah.

Desa Rawang Oguang, seperti banyak desa lainnya wilayah Kuantan Hilir Seberang, seringkali terdampak oleh bencana banjir. Frekuensi dan intensitas

banjir yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya upaya serius dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Tabel I.1 : Rekap Data Terdampak Banjir Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	NAMA DUSUN	JUMLAH RUMAH	KETERANGAN
1.	Dusun 1	60 Rumah	Terdampak Banjir
2.	Dusun 2	59 Rumah	Terdampak Banjir
3.	Dusun 3	-	-
Jumlah		119 Rumah	Terdampak Banjir

Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang 2024

Desa Rawang Oguang banjir sering kali menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah daratan rendah maupun di bantaran sungai. Jarak rumah warga dengan sungai menjadi faktor utama yang mengakibatkan terjadinya banjir di permukiman. Meskipun banjir sering terjadi masyarakat enggan pindah rumah, alasan utamanya yaitu meliputi kelangsungan emosional dengan tanah leluhur, biaya relokasi yang mahal serta penyewaan perumahan pengganti yang layak. Banyak warga yang lahir dan besar disana sehingga meninggalkan rumah berarti kehilangan jaringan sosial serta mata kontak dekat sungai.

Banjir menyebabkan berbagai macam resiko bagi masyarakat desa, diantaranya yaitu : kerugian materi (rusakannya rumah, harta benda), Kesehatan (penyebaran penyakit akibat air yang kotor), dan terhambatnya aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi seperti potensi gagal panen pada lahan pertanian. Masyarakat rawang oguang dulunya sangat bergantung pada perahu

kayu saat banjir melanda wilayah mereka, terutama seperti di desa rawang oguang. Perahu ini menjadi alat transportasi utama saat jalan darat terendam memungkinkan masyarakat untuk evakuasi, mencari makan, menjangkau warung, pasar, atau desa tetangga.

Masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir melalui Langkah-langkah preventif dan responsif yang terstruktur. Bentuk kesiapsiagaan mencakup empat dimensi utama seperti :

1. Pengetahuan tentang resiko, masyarakat perlu memahami pola banjir di wilayahnya, seperti faktor pemicu hujan deras atau luapan sungai, serta mengenali tanda-tanda awal seperti air naik cepat.
2. Rencana tanggap darurat, susun rencana keluarga yang mencakup jalur evakuasi, titik kumpul, dan daftar barang darurat seperti makanan kaleng dan obat-obatan.
3. Sistem peringatan dini, gunakan kentongan, toa masjid atau grup WhatsApp untuk menyebar informasi dengan cepat kepada masyarakat.
4. Mobilisasi sumber daya, periksa saluran drainase agar bebas sumbatan dan siapkan perahu atau tangga untuk evakuasi.

Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengimplementasikan program kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan respon masyarakat, tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan warga desa rawang oguang masih tergolong rendah. Warga desa memang cepat beradaptasi terhadap kondisi banjir dengan menggunakan perahu sederhana sebagai alat transportasi alternatif dan memindahkan hewan ternak ketempat yang lebih aman.

Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan cara tradisional dengan melakukan pengamatan manual seperti di tepi sungai untuk memprediksi kenaikan air. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terutama ketika kenaikan air terjadi pada malam hari, karena mereka merasa kurang mendapatkan informasi atau peringatan yang cukup untuk mengantisipasi bahaya tersebut secara dini. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang sistem peringatan dini terhadap bencana banjir di desa rawang oguang.

Menurut Haryanto (2001 : 35) mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal, bersifat kehidupan manusia, struktur social serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Ratnaningsih, dkk (2023 : 5) masyarakat banyak yang memandang bencana alam merupakan sebuah kejadian yang terjadi begitu saja dan diluar kemampuannya sehingga masyarakat cenderung hanya menanti kejadian bencana yang akan menimpah mereka. Pandangan tersebut dapat meningkatkan kerugian dari sebuah peristiwa bencana alam. Pandangan terhadap bencana alam sangat dipengaruhi budaya, lokasi, geografi, tingkat Pendidikan dan pengalaman pribadi. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor alam yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia, berupa aktifitas geologis, atmosfer, iklim, manusia bahkan gabungan berbagai faktor. Faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, kelerengan tanah yang lebih rendah dari permukaan laut akan meningkatkan resiko bencana banjir bila manusia tidak mampu mengelola sumber

daya alam dengan baik sehingga tanggul ataupun aliran sungai tidak mampu menahan debit air hujan.

Menurut Nababan (2022 : 29) kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal untuk mengantisipasi suatu bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana banjir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan kesiapsiagaan guna mengurangi kerugian terhadap banjir. Kesiapsiagaan dari masyarakat akan meminimalkan dampak negatif yang muncul dari suatu bencana yang terjadi. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana memiliki peran cukup penting, karena berpengaruh pada tindakan masyarakat ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan sangat berkaitan dengan pengetahuan mengenai suatu bencana itu sendiri.

Dampak banjir terhadap masyarakat :

1. Gangguan aktivitas masyarakat, tenggelannya pemukiman karena banjir yang cukup besar mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pekaian seadanya membuat masyarakat kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari dan termasuk kegiatan pendidikan.
2. Kesulitan air bersih, banjir yang terjadi membuat ketersediaan air bersih masyarakat berkurang. Baik untuk minum ataupun kebutuhan sehari-hari.
3. Menimbulkan kerugian ekonomi, banjir dapat menimbulkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana lainnya. masyarakat yang terdampak banjir juga akan kesulitan untuk bekerja

selama banjir terjadi. Hal tersebut dapat membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi.

Kesiapsiagaan bencana banjir dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan resiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat. Oleh karena itu analisis kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi sangat tepat untuk terus digalakkan agar masyarakat mampu menganalisis tindakan apa yang boleh dan tindakan apa yang bakal menciptakan potensi bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sikap membantu masyarakat dan pemerintah memahami pengetahuan tentang resiko bencana serta Langkah-langkah pencegahan secara mandiri maupun kolektif.
- 1.4.1.2 Memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terkait bagaimana perilaku kesiapsiagaan dipengaruhi oleh budaya, pengalaman bencana dan informasi.
- 1.4.1.3 Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian-enelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi pemerintahan Desa Rawang Oguang penelitian berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran warga tentang potensi bencana dilingkunga sekitar.
- 1.4.2.2 Bagi masyarakat Desa penelitian ini dapat mengurangi resiko dan kerugian yang terjadi saat bencana terjadi.
- 1.4.2.3 Bagi Lembaga Pendidikan kajian ini dapat dijadikan sumber ajar empiris dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran terhadap pelatihan meningkatkan pengetahuan tentanng bencana.
- 1.4.2.4 Bagi pemerintahan daerah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila secara formal dalam organisasi maka proses Kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Ali (2015 : 19) secara terminology apa yang disebut “administrasi adalah mengurus, emngatur, mengelolah. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan peraturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adanya terciptanya keteraturan dan susunan dan pengaturan dinamikanya.

Menurut Makmur, dkk (2017 : 30) administrasi negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus negara dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus Negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efesien dan efektif.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Sjamsuddin, 2016 : 109) mendefinisikan administrasi pubik (negara) yaitu, administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya. Dalam situasi dan

kondisi negara bagaimanapun, administrasi negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara; memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur negara.

Menurut Thoha (2012 : 14) administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan-urusan negara, kebijakan negara dan kewenangan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan bagaimana cara mereka memperolehnya. Ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik.

Menurut Leonard D. White (dalam Sjamsuddin, 2016 : 8) administrasi sebagai proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang di mulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi tidak ada yang mengetahuinya. administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Dwight Waldo (1955 : 15) administrasi negara tidak hanya mencakup aspek teknis dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga

menyangkut aspek moral, politik, dan nilai-nilai sosial. Administrasi negara harus dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab, moral dan sosial untuk mengelola kebijakan publik dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan demokrasi. Dengan demikian, administrasi negara bukan sekedar proses birokratis, tetapi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Henry (dalam Pasolong, 2016 : 19) ruang lingkup administrasi negara terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi publik pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi.
2. Manajemen publik, mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas dan lain-lain.
3. Implementasi, yaitu pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

Menurut Juharni (2015 : 2) istilah administrasi negara pun mempunyai berbagai macam definisi. Akan tetap jika kita menelaah lebih dalam tentang definisi-definisi mengenai administrasi negara maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda. Pola pertama adalah memandang bahwa administrasi negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif. Pola kedua memandang bahwa administrasi negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja. Akan

tetapi seluh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legistalif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya adalah bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

Menurut Nirgo (dalam Listyaningsih, 2014 : 3) administrasi negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Menurut Thoha (dalam Muhammad, 2019 : 32) kita dapat mengenali administrasi negara melalui karakteristiknya. Berikut ini adalah ciri-ciri administrasi negara :

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, tidak berjalan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semimonopoli.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan.

4. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Menurut Dimock (1996 : 17) administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi negara merupakan seni ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Woodrow Wilson (dalam Tangkilisan, 2020 : 36) mengemukakan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi. Menurutnya, politik menentukan kebijakan, sedangkan administrasi megimplementasikan kebijakan tersebut secara netral dan professional. Meskipun teori ini dikritik kerana terlalu menyederhanakan hubungan antar politik dan administrasi, pemikiran ini tetap menjadi pondasi penting dalam kajian administrasi negara.

Menurut Geoerge J. Godon (dalam Syafie, 2020 : 42) administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya. Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib, aman,

dan bertanggung jawab. Objek disiplin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi politik.

2.1.2 Teori/konsep Mitigasi Bencana

Menurut Daud (2020 : 1) mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, serta proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana yang benar-benar terjadi.

Menurut Suardi Wekke (2021 : 11) mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan atau peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk kedalam bencana alam (*natural disaste*), maupun bencana sebagai akibat perbuatan manusia (*man-mode distater*).

Mitigasi bencana adalah landasan manajemen darurat. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap orang dan properti. Mitigasi melibatkan menjauhkan rumah dari daratan banjir, merekayasa jembatan

untuk menahan gempa bumi, membuat dan menegakkan aturan bangunan yang efektif untuk melindungi properti dari badai, dan banyak lagi.

Menurut Coppola (dalam Weicsegartner, 2014 : 11) mitigasi didefinisikan sebagai tindakan berkelanjutan yang mengurangi dan menghilangkan resiko jangka panjang terhadap manusia dan properti dari bahaya alam dan efeknya. Ini menggambarkan upaya berkelanjutan ditingkat federal, negara bagian, lokal dan individu untuk mengurangi dampak bencana terhadap keluarga, rumah, komunitas, dan ekonomi.

Bencana (*disaster*) merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan, sehingga menimbulkan terjadinya. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007.

Menurut Tyasara (2021 : 33) mitigasi adalah kata benda dalam bahasa Inggris yang mengacu pada prosedur untuk mengurangi bahaya, kepentingan, penderitaan, atau keparahan. Ungkapan “*mitigation*” secara sederhana berarti membuat pilihan secara sadar untuk menghadapi dan mengurangi dampak kecelakaan untuk menjamin bahwa orang dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Menurut Maryono (dalam Mulyana, 2023 : 20) bencana banjir termasuk kejadian yang sering terjadi pada saat setiap datangnya musim penghujan. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan tata pembangunan sarana dan prasarana.

Mitigasi bencana dapat membantu masyarakat melalui penerapan, teknologi dan praktik mitigasi, masyarakat dapat memastikan bahwa lebih sedikit orang negara, masyarakat dan komunitas yang menjadi korban bencana alam akibat dampak penerapan teknologi.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan *United Nations Education Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana banjir yaitu :

1. Pengetahuan dan sikap terhadap resiko banjir.
2. Kebijakan dan panduan.
3. Rencana untuk keadaan darurat.
4. Sistem peringatan bencana.
5. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya.

Menurut Giri (dalam Veri Anggraini, 2023 : 17) mitigasi bencana merupakan upaya berkesinambungan untuk meminimalisir dampak yang disebabkan bencana terhadap manusia dan harta benda.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB (2012 : 80) bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu faktor ulah manusia juga berperan peting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke sungai, pembagunan pemukiman di daerah dartan banjir dan sebagainya

Menurut Jane A. Bullock (2020 : 4) mitigasi juga dapat didefinisikan sebagai Tindakan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko terhadap orang dan properti dari bahaya dan efeknya.

Tujuan mitigasi bencana :

1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk.
2. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembagunan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Menurut United Nations Development Programme UNDP (dalam Ramli, 2010 : 10) bencana merupakan kejadian dalam lingkungan alam atau manusia yang ekstrem secara langsung dapat menyebabkan kerugian dan berdampak pada kehidupan manusia, harta benda atau kegiatan yang tingkatnya menyebabkan bencana.

Salah satu penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan, dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, pengertian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, melalui pembagunan fisik maupun penyadaran kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2.1.3 Teori/konsep Pemerintahan Desa

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan Lembaga musyawara desa.

Menurut Dwipayana & Eko (2021 : 46) kepala desa memiliki peran sentral dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Kepemimpinan kepala desa tidak hanya bersifat *administrative*, tetapi juga sosial dan transpornasional. Kepala desa yang ideal adalah pemimpin yang mampu menggerakkan pastisipasi masyarakat, menjembatani konflik sosial, serta mengarahkan pembagunan desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks modern, kepemimpinan kepala desa yang adptif dan kolaboratif akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembagunan ditingkat desa.

Menurut Rasyid (dalam Raharjo, 2021 : 4) pada dasarnya ada beberapa fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*publik service*), pembagunan (*development*), pemerdayaan (*emporwering*), dan pengaturan (*regulation*).

Pemerintahan dea merupakan struktur pemerintahan terendah yang berperan penting dalam sitem penyelenggaraan pemerintahan nasional. desa tidak hanya dipandang sebagai satuan administrative, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta diakui

dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini menempatkan desa sebagai etintas yang memiliki otonomi asli dan menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pembangunan nasional.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan badan hukum mandiri yang berhak dan memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya sendiri. Berdasarkan UU desa No. 6 Tahun 2014, didukung dengan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Anggaran pendapatan belanja negara (APBN), yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berdasarkan pancasila, Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 dan bhineka tunggal ika.

Menurut Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014, Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Mengenai isu utama pemerintahan desa. Menurut Eko (2008 : 9) pada umumnya adalah :

1. Kedudukan dan kewenangan desa.
2. Perencanaan pembangunan desa.

3. Keuangan desa.
4. Demokrasi desa. Dan,
5. Birokrasi desa.

Menurut Amin Suptrihatini (2007 : 9) pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemeritah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Menurut syaffie (2020 : 13) menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan ceminan penerapan prinsip *good governance* ditingkat lokal. Menurutnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan desa tidak dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan kepala desa, tetapi, harus melibatkan berbagai elemen masyarakat agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, pemeritahan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan.

Badan Permusyaaratan Desa (BPD) berfungsi menempatkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan BPD adalah enam tahun dan dapat dipilih

lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut Siagian (2000 : 132) dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhan pada gilirannya menjadikan upaya pencapaiannya semakin sulit.

2.1.4 Teori/konsep Kesiapsiagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan ialah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk merespon secara cepat keadaan/situasi pada saat bencana dan segera setelah bencana. Kesiapsiagaan bencana merupakan kepentingan semua lembaga, masyarakat, individu. masing-masing komponen dalam *Stakeholders* memiliki peran yang berbeda dan harus dipadukan untuk dapat mencapai kesiapsiagaan secara menyeluruh. Artinya setiap lembaga dan masyarakat memiliki kewajiban dalam menanggulangi bencana dan menyiapkan diri untuk dapat menghadapi bencana dengan cepat dan tepat.

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006 : 19) kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Kesiapsiagaan adalah Tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personal. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat.

Fase Pra Bencana

a. Pencegahan

Pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastic akibat ancaman melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik dan lingkungan. tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang.

b. Mitigasi

Mitigasi adalah tindakan-tindakan yang menfokuskan perhatian pada pengurangan dampak negatif pencegahan ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian fisik dan lingkungan.

c. Kesiapsiagaan

Fase kesiapsiagaan adalah fase dimana dilakukan persiapan yang baik dengan memikirkan berbagai tindakan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana dan menyusun perencanaan agar dapat melakukan kegiatan pertolongan serta perawatan yang efektif pada saat terjadi bencana.

Saat Bencana

Kondisi saat bencana merupakan tanggap darurat yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Menurut Akbar (2019 : 12) kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah suatu kondisi masyarakat baik secara individu maupun kelompok memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bentuk apabila terjadi suatu bencana maka cara yang

terbaik adalah menghindari resiko tempat terjadinya bencana, tempat tinggal, seperti jauh dari jangkauan banjir.

Menurut Nababan (2022 : 2) kesiapan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal untuk mengantisipasi suatu bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana banjir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan kesiapsiagaan guna mengurangi kerugian terhadap banjir. Kesiapsiagaan dari masyarakat akan meminimalkan dampak negatif yang muncul dari suatu bencana yang terjadi.

Menurut Rezki (2014 : 30) menyatakan bahwa tujuan kesiapsiagaan bencana antara lain :

1. Mengurangi ancaman, Untuk mencegah ancaman bencana banjir terjadi ada banyak cara atau tindakan dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman bencana.
2. Mengurangi kerentanan masyarakat, Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi, persiapan yang baik dapat membantu masyarakat dalam melakukan tindakan yang tepat waktu. Masyarakat yang pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri dengan melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi.
3. Mengurangi akibat, untuk mengurangi akibat suatu ancaman, masyarakat harus bertindak apabila terjadi bencana khususnya masalah penyediaan

air bersih yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga masyarakat sadar akan kejadian penyakit menular.

4. Menjalin kerjasama, tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat. Penanganan bencana dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, untuk menjamin kerjasama yang baik pada tahap setelah terjadinya bencana, maka masyarakat perlu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak seperti : Puskesmas, aparat desa atau kecamatan.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah suatu kondisi masyarakat baik secara individu maupun kelompok memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bentuk apabila terjadi suatu bencana maka cara yang terbaik adalah menghindari resiko tempat terjadinya bencana, tempat tinggal, seperti jauh dari jangkauan banjir.

Menurut Pahleyisnnur (2019 : 250) kesiapsiagaan dalam penanganan bencana banjir perlu dibangun dan ditingkatkan, dalam hal ini masyarakat harus selalu berupaya memahami cakupan kesiapsiagaan dan berwaspada pada saat bencana banjir terjadi untuk mengurangi resiko dari terjadinya bencana, peningkatan pemahaman melalui pengetahuan memiliki urgensi yang penting. Salah satu cara meningkatkan kesadaran adalah dengan mengubah pengetahuan seseorang terhadap satu hal. Jika pengetahuan masyarakat terhadap bencana tergolong baik, maka dapat diwujudkan generasi yang tangguh bencana dan memiliki kesiapsiagaan yang baik terhadap bencana.

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2016 : 13) ada 4 faktor yang telah disepakati sebagai parameter untuk mengukur kesiapsiagaan masyarakat untuk mangantisipasi bencana, yaitu :

1. Pengetahuan terhadap resiko bencana

Pengetahuan merupakan faktor utama kunci kesiapsiagaan, Pengetahuan yang harus dimiliki mengenai bencana yaitu pemahaman tentang bencana dan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut, meliputi penyelamatan diri yang tepat saat terjadi bencana serta peralatan yang perlu disiapkan sebelum terjadi bencana.

2. Rencana Tanggap Darurat

Menurut BRIN-UNESCO/ISDR, rencana tanggap darurat merupakan salah satu aspek paling krusial dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rencana ini mencakup penyusunan jalur dan lokasi evakuasi, pelaksanaan simulasi keselamatan, hingga perlindungan terhadap dokumen-dokumen penting.

Rencana tanggap darurat menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan pertolongan dan penyelamatan korban.

3. Sistem Peringatan Dini

Menurut BRIN-UNESCO/ISDR, sistem peringatan dini merupakan komponen krusial dalam rangkaian kesiapsiagaan terhadap bencana. sistem ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dan penyampaian informasi awal bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat

mengenai potensi bencana, serta memberikan waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi ke tempat yang aman.

Sistem peringatan dini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadi bencana, dengan adanya peringatan bencana masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lingkungan.

4. Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi sumber daya merupakan aspek vital dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka BRIN-UNESCO/ISDR. Aspek ini mencakup pengelolaan dan penggarakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran secara cepat, tepat dan terorganisir. tujuannya adalah untuk memastikan respons darurat yang efektif dan efisien, guna meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Gregg (dalam Dodon, 2013 : 129) kesiapsiagaan merupakan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi bencana yang akan datang guna menghindari korban jiwa, kerugian harta benda, serta berubahnya tata kehidupan dimasyarakat. Kesiapsiagaan bertujuan meminimalisir dampak bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisien untuk tindakan tanggap darurat dan bantuan saat bencana terjadi.

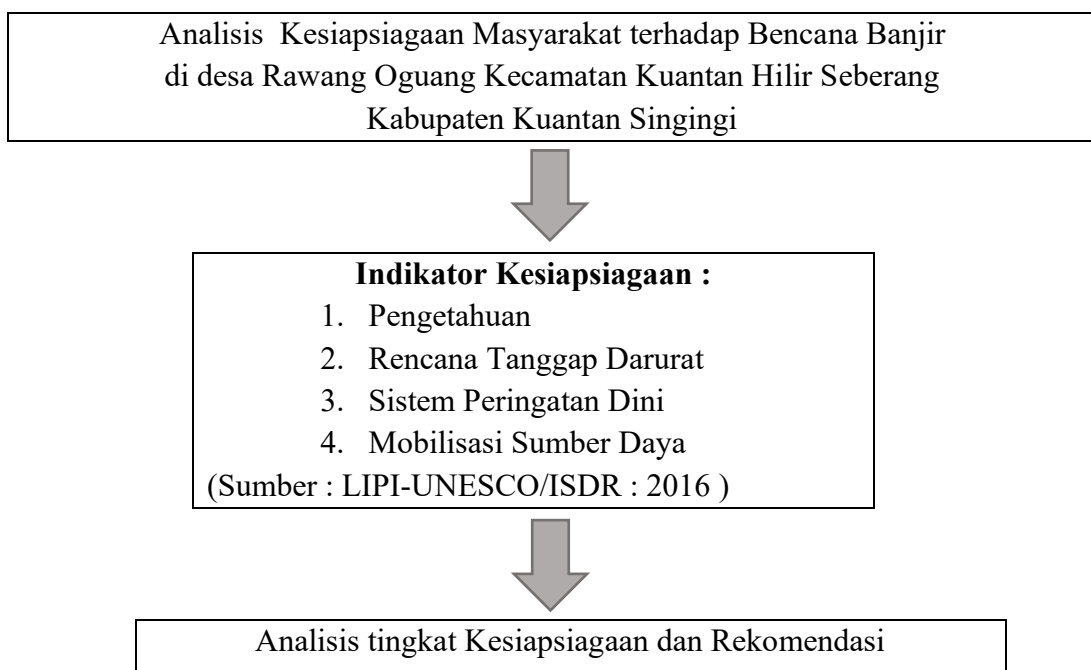
Menurut Firmansyah, dkk (2014 : 2) kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan merupakan komponen penting dari kegiatan pengurangan resiko bencana.

Menurut Bakornas (2007 : 17) faktor utama yang dapat mengakibatkan bencana tersebut meimbulkan korban dan kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman tentang karakteristik bahaya, sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber daya alam, kurangnya informasi peringatan dini yang mengakibatkan ketidak siapan dan ke tidak berdayaan atau ke tidak mampu dalam menghadapi bencana.

Menurut Maryani (2010 : 304) kesiapsiagaan atau preparedness adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui langkah-langkah pengorganisasian yang tepat sasaran dan berdaya guna.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pernyataan. dalam proposal penelitian Analisis Kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.3.1 Hipotesis Utama :

Terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara pengetahuan masyarakat tentang bencana banjir dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

2.3.2 Hipotesis Pendukung :

Faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, rencana tanggap darurat, dan sistem peringatan dini. Ini berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis faktor-faktor mana yang paling berpengaruh seberapa siap suatu komunitas menghadapi bencana banjir dan dapat memberikan rekomendasi untuk upaya mitigasi yang lebih efektif.

2.4 Definisi Operasional

Adapun yang akan di teliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator.

2.4.1 Pengetahuan

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006 : 5) pengetahuan merupakan faktor utama kunci kesiapsiagaan. Pengetahuan yang harus dimiliki mengenai bencan

yaitu pemahaman tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut, meliputi penyelamatan diri yang tepat saat terjadi bencana serta peralatan perlu disiapkan sebelum terjadi bencana.

Menurut Collins (dalam Swarjana 2022 : 22) pengetahuan adalah informasi dan pemahaman tentang sebuah subjek yang dimiliki seseorang atau yang dimiliki semua orang.

2.4.2 Rencana Tanggap Darurat

Menurut Hidayati (2011 : 6) rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama, dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari-hari pertama setelah kejadian bencana sebelum datangnya bantuan dari luar.

2.4.3 Sistem Peringatan Dini

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006 : 7) sistem peringatan dini meliputi tanda peringatan dan retribusi informasi akan terjadi bencana, dengan adanya peringatan bencana masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan. Sistem peringatan dini berfungsi sebagai alat utama dalam pengelolaan resiko bencana dengan mengurangi dampak buruk terhadap manusia dan asset. Kecepatan penyampaian peringatan menjadi faktor krusial keberhasilan sistem ini.

2.4.4 Mobilisasi Sumber Daya

Menurut Hidayati (2011 : 7) kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia, baik SDM, maupun pendanaan dan sarana-prasarana penting.

Kemampuan ini menjadi potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya mendali kendala dalam kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Karena itu, mobilisasi sumber daya menjadi faktor yang krusial. Secara umum mobilisasi sumber daya didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya, seperti material, tenaga kerja, modal, sumber daya manusia, guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Kesiapsiagaan	Bencana	Pengetahuan	1. Pemahaman masyarakat tentang penyebab banjir. 2. Sikap terhadap resiko banjir.	Ordinal
		Rencana Tanggap Darurat	1. Kesiapan mental. 2. Pelatihan simulasi.	Ordinal
		Sistem Peringatan Dini	1. Media peringatan. 2. Kecepatan reaksi.	Ordinal
		Mobilisasi Sumber Daya	1. Penyediaan alat dan personel. 2. Koordinasi pendistribusian.	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017 : 59) jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

Menurut Bogdan dan Biklen (2016 : 54) kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

3.2 Informan

Menurut Sugiyono (2018 : 30) sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian.

Tabel III.1 : Informan Penelitian Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Masyarakat yang terdampak banjir	10	1	10%
3	BPBD	1	1	100%
Jumlah		12	3	25%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

Menurut Sugiyono (2016 : 218-219) teknik penarikan informan dapat dilakukan melalui *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2020 : 104) data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan berbagai metode misalnya observasi, wawancara dan lain sebagainya. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian berupa hasil Analisis kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di desa rawang oguang kecamatan kuantan hilir seberang, kabupaten kuantan singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020 : 104) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dimaksud yaitu segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai

atau arti penting yang dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa data dari asrip, makalah, majalah ilmiah, internet, serta buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Analisis Kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat Jalan Perkebunan Desa Rawang Oguang Nomor Kode Pos 29561.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono, 2014 : 165) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2020 : 104) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh penelitian harus cermat, teliti dan menyeluruh sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan detail. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan bencana banjir.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Asmani (dalam Surjarweni, 2022 : 93) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen atau catatan yang valid dan detail.

Menurut Gottschalk (dalam Gunawan & Imam, 2015) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2014 : 125) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3.7 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020 : 131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.7.1 Data Reducation (Reduksi Data)

Menurut miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 71) reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transfortasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

3.7.2 Data Display (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2016 : 249) dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Conlution Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Menurut Sugiyono (2018 : 252) langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dengan responden, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana banjir. Oleh sebab itu, tata ruang desa perlu ditinjau ulang agar lebih aman dan sesuai dengan kondisi alam. Seperti gotong royong bersama, bersihkan sungai dari sampah, bangun saluran air yang berfungsi dengan baik. Pastikan juga bantuan dari pemerintah disalurkan secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

4.2.2 Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan lebih peduli dengan kesiapsiagaan demi meminimalisir resiko dan kerugian yang terjadi pada saat bencana banjir. Penting bagi masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana banjir di masa depan. Dengan cara aktif dalam menambah pengetahuan, meningkatkan kewaspadaan dan latihan tentang bagaimana menyelamatkan diri saat banjir datang.

4.2.3 Bagi BPBD

BPBD diharapkan untuk memberikan informasi tentang pembatalan peringatan terjadinya bencana banjir atau informasi bahwa keadaan sudah aman dari bencana banjir.

4.2.4 Bagi Pengurus RT/RW

Membentuk struktur kepengurusan khusus atau kager siaga bencana banjir tingkat RT/RW untuk mengoordinasi warga saat pra bencana dan pasca bencana banjir.

4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan informasi terkait kesiapsiagaan dan indikator-indikator kesiapsiagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, A. (2010). Desa Siaga dan Manajemen Kesehatan Bencana. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat,
- Ali, Faried. 2015a. Teori dan Konsep Administrasi. *Four Edition*. Jakarta Rajawali Pers.
- Akbar,Muh. 2019. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Longsor Di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolopao Kabupatn Gowa. *Skripsi*. (online). <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.
- Atelia, S.F., Hidayat, R., & Rizki, M.F. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,8(14), 297-307).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Tahun). Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Ismail Suardi Wekke. (2021) *Buku Mitigasi Bencana*.
- Juharni. 2015. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Makassar. CV SAH MEDIA
- LIPI-UNESCO/ISDR, 2006, *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Stunami*, Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- LIPI-UNESCO/ISDR, 2016. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Banjir*. Deputi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Maryani, E. (2010) Model Pembelajaran Bencana dalam ilmu pengetahuan di Sekolah Menengah Pertama). *Jurnal Geografi Gea*, 10
- Model Pelatihan Mitigasi Bencana /Daud, F, dkk. Makasar : Global RCI, (2020)
- Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 10286-10300
- Novita Sari , Rezki. 2014. Gambaran Kesiapsiagaan Siswa Terhadap Menghadapi Bencana Gempa Tsunami Di Sekolah Menengah Atas Banda Aceh. *Skripsi*. (online). <http://etd.unsyiah.ac.id>.Diakses pada tanggal 23 juni 2014.

- Pahleviannur, M. R. 2019. *Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 29(1), h.49-55
- Pasolong, Harbani, 2016, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : CV Alfabeta
- Raharjo, Muhammad Mu'iz, 2021, *Tata Kelola Pemerintah Desa*, Jakarta Timur : PT. Bumi Aksara
- Rialdi, R. (2011). Analisis Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Dan Kesiapsiagaan Masyarakat Pasca Erupsi Merapi 2010 Pada Pelaksanaan Desa Siaga Di Desa Talun.
- Sakdiah, H. 2019. *Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Serampah Aceh Tengah Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi*, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, 2(3), 358-365.
- Sedarmayanti. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Refika Aditama.
- Siti Marwiyah, (2022) Buku Ajar Penngantar Ilmu Administrasi Negara.
- Sugiyono (2020), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, bandung
- Sujarweni, V.W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Sumino-LPTP, dkk. (2020). *Buku Pengembangan Sistem Peringatan Dini Inklusif Di Masyarakat*.
- Tangkilisan, H. (2020). *Ilmu Administrasi Negara*. Gava Media
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Tentang Penanggulangan Bencana
- Widiasih, S., Zulfaturrohamah, Z., & Rofiyanti, E. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Petugas Dalam Menghadapi Bencana Banjir Pada Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Pusat. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(9), 915-924.

Wijaya, G. A. P., & Furi Sari Nurwulandari, D. P. (2020). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kabupaten Belitung Timur (*Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Unpas*)

